

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2015. Pengelolaan Keuangan desa: *Sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa*.
- Cohen & Uphoff. 1990. *The Amaquity Of Participation*. Third World Quarterly. New York.
- Damayanti, Wienda. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Diansari, Rani Eka, 2015. Analisa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) kasus seluruh desa dikecamatan Kledug Kabupaten Temanggung Tahun 2013.Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.
- Dwiningrum, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan,(2011)
- Ghozali, imam.(2016) *.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.(mulyadi m. , partisipasi masyarakat dalam membangun masyarakat desa, 2009)
- Karyadi. 2020. “Pengelolaan Dana Desa”. *Hasil Wawancara Pribadi*:15 Februari 2020, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
- Koppel, Jonathan. 2005. *Pathologies Of Accountblity ICANN and the Challenge of “Multiple Accountability Disorder”*, Public Administration Review, January/February 2005, Vol. 65 Dokumen No.1
- Kumalasari, I,B,Riharjo, 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offeset.
- Marta, Taupik. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)*.
- Miftahudin. (2018). *Akuntabiitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.
- Mulyadi, Mohammad. (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*.

- Nahrudin, Zulfan. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
- Ni Luh Putu Uttarib Premananda, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar.
- PP (Peraturan Pemerintah) No.60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, Dan evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permendagri PAN) Nomor 13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan public dengan partisipasi masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20-38.
- Prasojo, E., Dan T. Kurniawan. 2008. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dan sejumlah Daerah di Indonesia*. Makalah disajikan dalam *the 5th International Symposium of jurnal Antropoogi Indonesia*. Banjarmasin.
- Putra, Hikmawan S, 2011. Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Reinventing Government* dalam Pelayanan Publik. *Government Science, Knowledge and Islamic*.
- Ramadhan, Riza 2014. Analisis perbandingan pengelolaan keuangan Desa Bangsri dengan pengelolaan keuangan Desa menurut Permendagri 37 Tahun 2007. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.
- Rika, Ardiyanti. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

- Rina. 2018 Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
- Santoso, Slamet. 2015. *Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengolahan Data*. Ponorogo : UMPO Press.
- Sedamayati. 2012. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Bandung: PT. Bandar Maju
- Sedarmayanti, M.Pd.,APU.2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta Bandung.
- Sugista, Risky Amalia. (2017). “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, terhadap pembangunan desa”. Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- Sumarna, Ayi 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa.
- T,FitrawanMondale DKK. (2017). *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pebandingan pada Desa Blang Kolak 1 dandesa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*.Jurnal.Vol.3, No.2, Hlm.196-212.
- Titiek Puji Astuti. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Weny, Ultrafiah. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*.
- Yuliarta, 2013. Pengaruh kompetensi penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah Dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.